



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA SIDANG II  
TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

**JUM'AT, 11 DESEMBER 2020**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

*Yang Kami hormati:*

- Para Wakil Ketua DPR;*
- Para Anggota DPR;*
- Hadirin yang berbahagia.*

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

Walaupun ruang waktu pada masa persidangan ini relatif singkat, DPR RI telah dapat mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya. Seluruh anggota DPR RI dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya ditengah situasi pandemi Covid-19 dan tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Pada Masa Sidang II ini, dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Saat ini DPR sedang membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021, dan akan ditetapkan pada masa sidang yang akan datang. Proses penyusunan daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang dilakukan DPR dan Pemerintah bersama dengan DPD saat ini akan menjadi pedoman yang menentukan target legislasi DPR pada tahun 2021.

Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 agar disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kinerja pembahasan RUU dalam Situasi Covid-19 serta prioritas kebutuhan hukum nasional. Dengan demikian produk legislasi yang dihasilkan akan efektif

untuk melaksanakan kebijakan negara yang sangat dibutuhkan saat ini.

Pada tahun 2020 ini, tercatat DPR bersama dengan Pemerintah dan dengan melibatkan DPD sesuai kewenangannya, telah menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) RUU menjadi Undang-Undang.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Pelaksanaan fungsi anggaran, pada masa persidangan ini, DPR melalui alat kelengkapan dewan, terus melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 di kementerian/lembaga. Fokus pembahasan evaluasi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama diarahkan pada penyerapan anggaran di Kementerian/lembaga, capaian pembangunan nasional, penanganan dampak pandemi Covid-19 pada program strategis Kementerian/Lembaga, serta Program Pemulihan ekonomi nasional.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, maka stimulus fiskal menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. DPR terus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional agar dapat berjalan secara tepat sasaran dan tepat manfaat.

DPR mengapresiasi Pemerintah yang telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga, serta para gubernur sebagai tindak-lanjut telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pemerintah agar dapat segera memastikan percepatan realisasi belanja pada Kuartal Pertama 2021, untuk memperluas konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan APBN untuk program pembangunan nasional, agar tetap memperhatikan efektivitas program, efisiensi anggaran, menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II ini, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja, baik terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di berbagai bidang dan sektor, maupun penanganan berbagai isu/permasalahan, termasuk pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap AKD.

DPR mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan Pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19. Namun penambahan jumlah kasus per hari telah mencetak rekor baru, sehingga Pemerintah agar segera melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah penularan Covid-19 dan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

Kehadiran vaksin Covid-19, tentu memberikan harapan yang besar untuk dapat segera mengakhiri pandemi Covid-19. Dalam penanganan vaksin Covid-19, Pemerintah agar memastikan

bahwa vaksin tersebut aman dan layak untuk digunakan. Pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas mengenai vaksin Covid-19, agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

DPR juga memberikan perhatian pada permasalahan aksi teror kepada warga Desa Lumbantangoa, Palopo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah mengakibatkan 4 (empat) orang warga menjadi korban.

Pada kesempatan ini, Pimpinan DPR menyampaikan duka cita yang mendalam kepada masyarakat dan keluarga korban aksi teror yang terjadi pada 29 November 2020 tersebut, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Atas peristiwa aksi teror yang tidak berperikemanusiaan tersebut, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR mengutuk keras dan kepada aparat keamanan Polri maupun TNI agar segera dapat menangkap pelaku beserta jaringannya dan mengungkap permasalahannya. Kepada masyarakat, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu -isu yang dapat merusak persatuan anak bangsa.

DPR juga melakukan pengawasan khusus terhadap persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2020, dan telah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 lalu. Alhamdulillah Pilkada Serentak telah berjalan dengan aman dan lancar di seluruh daerah. Kita semua berharap semoga Pilkada

Serentak 2020 ini dapat menjadi sarana pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan Otonomi Khusus (Otsus), pada masa sidang ini DPR RI telah melakukan kunjungan ke Aceh dan Yogyakarta. Pimpinan DPR telah mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Otsus Papua secara menyeluruh, sehingga tujuan Otsus yaitu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah agar terus membuka dan melakukan komunikasi dengan para tokoh Papua dan Papua Barat, sehingga terbangun keselarasan pandangan dan sikap dalam menjalankan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dalam memasuki perubahan cuaca, musim, dan fenomena La Nina, Pemerintah agar mengantisipasi dan me-mitigasi bencana, khususnya di daerah rawan bencana, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak bencana yang mungkin terjadi.

Memasuki akhir Desember, terdapat perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Pemerintah agar memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Selain itu, Pemerintah agar melakukan antisipasi terhadap meningkatnya arus transportasi pada akhir Desember.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Pada Masa Persidangan II ini DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

1. 8 (delapan) Calon Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025;
2. 7 (tujuh) Calon Anggota Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025;
3. 7 (tujuh) Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Selain itu, DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 4 (empat) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Selama masa sidang ini, Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) telah melakukan beberapa pertemuan secara tatap muka maupun daring untuk membicarakan penguatan kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara mitra. Melalui BKSAP, kita juga telah mengadakan webinar untuk membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian kita, antara lain webinar “*The Palestinian Cause and Ways to Support It in Light of the Regional and International Developments*” pada 30 November lalu. Kita juga telah mengadakan serangkaian kegiatan BKSAP *Day* untuk menyerap aspirasi masyarakat demi penguatan diplomasi parlemen DPR RI.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Kita menghadapi situasi yang masih belum pulih dari pandemi Covid-19, yang telah memberikam dampak yang sangat besar kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Upaya menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya,

tidak dapat dilakukan secara cepat. Marilah kita ikut mengambil peran dan tanggung jawab, sebagai anggota DPR RI, untuk bersama rakyat di daerah pemilihannya, membangun kebersamaan untuk menjalankan protokol kesehatan dan memperkuat optimisme bersama dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19.

Melalui mimbar Rapat Paripurna ini, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

Kepada Yang Terhormat Anggota DPR-RI, kunjungi dan sapa rakyat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, sampaikan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh Dewan, dan persatukanlah rakyat dalam semangat gotong royong membangun Indonesia maju.

Kami ucapkan selamat bekerja di Masa Reses, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

***Om shanti shanti shanti om.***

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
Dr. (H.C) PUAN MAHARANI**



## LAMPIRAN

Pada Masa Persidangan II ini DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

1. 8 (delapan) Calon Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025, yaitu:
  1. Agus Puji Prasetyono Akademisi;
  2. Musri Akademisi;
  3. Satya Widya Yudha Industri;
  4. Herman Darnel Ibrahim Industri;
  5. Daryatmo Mardiyanto Konsumen;
  6. Eri Purnomohadi Konsumen;
  7. As Natio Lasmen Teknologi;
  8. Yusra Khan Lingkungan Hidup.
  
2. 7 (tujuh) Calon Anggota Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025, yaitu:
  1. Dr. Joko Samito, S.H., M.H. (Mantan Hakim);
  2. Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I. (Mantan Hakim);
  3. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. (Praktisi Hukum);
  4. Sukma Violetta, S.H., LL.M. (Praktisi Hukum);
  5. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., M.Hum. (Akademisi Hukum);
  6. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Akademisi Hukum);
  7. Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. (Unsur Masyarakat).

3. 7 (tujuh) Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024, yaitu:
  1. Syarif Burhanuddin;
  2. Taufik Widjoyono;
  3. Agus Taufik Mulyono;
  4. Agus Gendroyono;
  5. Tri Widjajanto;
  6. Ludy Eqbal Almuhamadi; dan
  7. Manlian Ronald Adventus.